

# **BAB I**

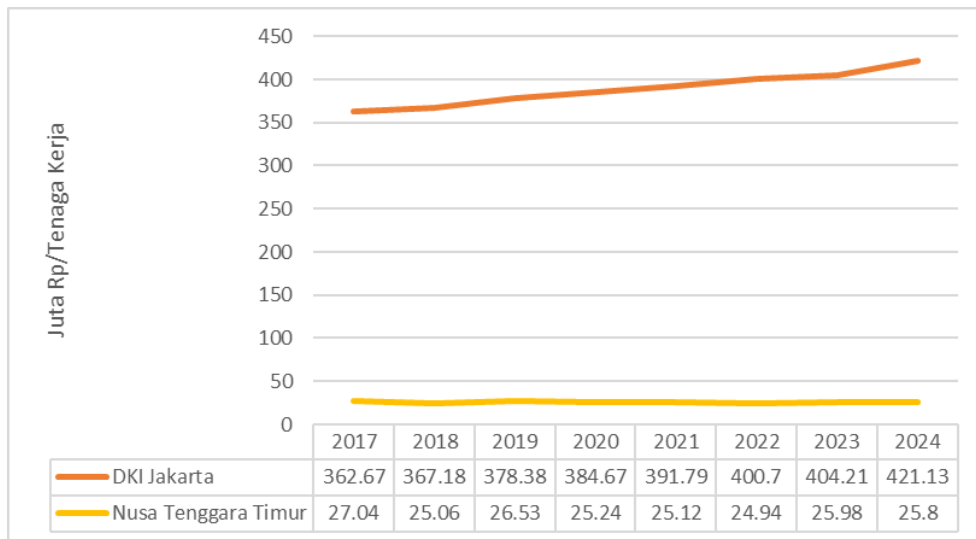
## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Produktivitas tenaga kerja adalah salah satu indikator penting untuk menilai pembangunan ekonomi suatu negara mengalami kemajuan. Produktivitas tenaga kerja memperlihatkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mencapai produksi yang lebih tinggi (Yousaf, 2023). Ketika tingkat produktivitas meningkat, pekerja mampu memproduksi lebih banyak tanpa penambahan input, sehingga mendorong peningkatan efisiensi operasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia sendiri, upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja menjadi fokus strategis dalam memperkuat daya saing nasional, terutama di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut keterampilan serta kemampuan adaptasi yang tinggi dari sumber daya manusia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS yang meliputi 34 provinsi selama periode 2017-2024, produktivitas tenaga kerja di Indonesia mengalami peningkatan dari rata-rata Rp81.910.000 juta per tenaga kerja pada 2017 dan naik sebesar 9,06% menjadi Rp89.330.000 juta per pekerja pada 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam performa tenaga kerja secara keseluruhan, walaupun laju pertumbuhan produktivitas relatif lebih pelan jika dibandingkan dengan kenaikan upah minimum dan kemajuan mutu SDM.

Berdasarkan data produktivitas tenaga kerja provinsi di Indonesia periode 2017-2024, terlihat adanya ketimpangan di antara provinsi dengan tingkat produktivitas tertinggi serta terendah. Pada kelompok provinsi dengan produktivitas tinggi, DKI Jakarta secara konsisten menempati posisi teratas dengan nilai produktivitas mencapai Rp362.670.000 per tenaga kerja pada tahun 2017 dan meningkat sebesar 16,12% menjadi Rp421.130.000 pada tahun 2024. Sebaliknya, beberapa provinsi menunjukkan tingkat produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah dibandingkan wilayah lainnya.



**Gambar 1.1 Peringkat Tertinggi dan Terendah Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia Tahun 2017-2024**

*Sumber: Data dari Kementerian Ketenagakerjaan, 2026*

Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi dengan nilai produktivitas terendah, yaitu sekitar Rp27.040.000 per tenaga kerja pada tahun 2017 dan turun sebesar 4,59% menjadi Rp25.800.000 pada tahun 2024. Perbedaan tersebut memperlihatkan kesenjangan struktural yang relatif besar antar wilayah, dengan kemungkinan dipengaruhi oleh variasi tingkat pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, investasi, serta ketersediaan infrastruktur.

Kenaikan upah minimum dapat mendorong produktivitas melalui mekanisme upah efisien karena pekerja lebih termotivasi dan mempertahankan kinerja yang tinggi. Namun dampaknya tidak seragam di seluruh sektor dan wilayah. Perusahaan padat karya dan daerah dengan struktur biaya yang ketat berpotensi mengalami penyesuaian seperti efisiensi tenaga kerja atau relokasi. Data Badan Pusat Statistik Indonesia periode 2017-2024 menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada beberapa indikator ekonomi dan sosial yang berpotensi berdampak terhadap produktivitas tenaga kerja. Rata-rata upah minimum provinsi meningkat dari sekitar Rp2.663.647 pada tahun 2017 dan naik sebesar 16,88% menjadi Rp3.113.359 pada tahun 2024. Kenaikan ini menggambarkan upaya pemerintah dalam menjamin standar kehidupan layak bagi pekerja dan mendorong

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, pengaruh kenaikan upah minimum tidak berdampak langsung pada produktivitas (Kim & Jang, 2019). Tetapi dalam beberapa kasus, peningkatan upah mampu memotivasi pekerja untuk bekerja lebih efisien dan berkinerja tinggi. Di sisi lain, bagi perusahaan terutama di sektor padat karya, peningkatan upah mampu menambah beban biaya produksi sehingga berpotensi melemahkan daya saing dan efisiensi usaha.

Selain faktor upah, kenaikan produktivitas tenaga kerja sangat bergantung pada mutu SDM. Mutu SDM di Indonesia dievaluasi melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi tiga aspek utama: usia harapan hidup yang panjang dan sehat, akses terhadap pendidikan, serta standar hidup yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024a), rata-rata IPM nasional memperlihatkan tren peningkatan dari 70,81 di tahun 2017 dan naik 2,23% mencapai 72,39 di tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan kemajuan di sektor kesehatan, pendidikan, serta kemakmuran rakyat. Perbaikan mutu manusia ini berfungsi sebagai fondasi untuk meningkatkan kompetensi pekerja di pasar dalam negeri maupun internasional. Namun demikian, perkembangan IPM belum merata di seluruh provinsi, karena beberapa daerah masih menghadapi ketimpangan kualitas pendidikan serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

Di sisi lain, investasi merupakan faktor penting yang dapat mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui adopsi teknologi baru, peningkatan kapasitas produksi, serta terciptanya proses kerja yang lebih efisien. Investasi pada peningkatan kualitas pendidikan serta keterampilan tenaga kerja memberikan pengaruh terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya alam yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan sektor industri ekspor (Tran et al., 2019). Peningkatan investasi memungkinkan perusahaan untuk memperbarui peralatan produksi dan meningkatkan kualitas modal fisik, sehingga dapat mempercepat transfer teknologi dan mendorong efisiensi kerja. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa realisasi investasi di Indonesia mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2017 investasi

tercatat sebesar Rp692.807.696 dan terus meningkat hingga mencapai Rp1.714.228.207 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya peran penting investasi dalam mendukung aktivitas ekonomi dan peningkatan kinerja sektor tenaga kerja di Indonesia.

Salah satu alasan utama terjadi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya pengangguran di suatu wilayah adalah ketidakmerataan ekonomi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja (Moyo et al., 2024). Pemerintah melakukan segala upaya dalam mendukung peningkatan kinerja produktivitas tenaga kerja yang diantaranya yaitu meningkatkan tingkat indeks pembangunan manusia, memanfaatkan prasarana ekonomi dalam memperlancar kegiatan produktif, dan menetapkan peraturan upah minimum untuk melindungi ketenagakerjaan di Indonesia (Putra & Budiasih, 2024).

Dengan demikian, kaitan antara upah minimum, IPM, dan investasi dengan produktivitas tenaga kerja menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Peningkatan upah dapat memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerja, namun pada saat yang sama juga dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, peningkatan IPM dapat memperkuat efek positif dari kebijakan upah terhadap produktivitas tenaga kerja karena pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik dalam menjalankan pekerjaan. Di sisi lain, investasi berperan dalam meningkatkan produktivitas melalui penyediaan teknologi, modernisasi proses produksi, serta peningkatan kualitas modal fisik yang mendukung efisiensi kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan *System Generalized Method of Moments (System GMM)* untuk mengatasi permasalahan endogenitas dan menghasilkan estimasi yang lebih konsisten dan reliabel.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024?

3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024.
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024.
3. Menganalisis pengaruh investasi terhadap produktivitas tenaga kerja di Indonesia tahun 2017-2024.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dalam aspek teori maupun praktik, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan riset ekonomi ketenagakerjaan, terutama dalam menelaah keterkaitan antara upah minimum, mutu sumber daya manusia, serta produktivitas pekerja di Indonesia. Dengan menerapkan *System GMM*, penelitian ini memperkaya literatur terkait pendekatan estimasi yang bersifat dinamis dalam ranah ekonomi besar dan dunia kerja. Temuan dari kajian ini juga berfungsi sebagai data empiris yang menguatkan teori modal manusia (*human capital theory*) serta teori upah efisien (*efficiency wage theory*), yang menegaskan bahwa perbaikan kemakmuran dan kualitas individu akan memberikan efek positif pada peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, penelitian ini turut memperdalam wawasan tentang elemen-elemen yang menentukan produktivitas tenaga kerja di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi penting untuk para perancang kebijakan, praktisi bisnis, serta institusi akademik. Bagi

pemerintah, hasilnya bisa dijadikan landasan untuk menyusun aturan upah yang adil dengan mempertimbangkan kebutuhan karyawan sekaligus kapasitas perusahaan, serta menguatkan program pengembangan manusia melalui perbaikan mutu edukasi dan penyebaran IPM yang merata di berbagai daerah. Selain itu, bagi dunia usaha, penelitian ini membantu memahami kaitan antara regulasi kompensasi dan performa pekerja, sehingga pendekatan untuk meningkatkan efisiensi tidak hanya bergantung pada stimulus finansial, melainkan juga pada program latihan dan peningkatan kemampuan.

